

BAB V

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

A. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat diketahui bahwa dalam mengemban tugas menjadi kepala sekolah pada lembaga pendidikan, kepala sekolah sudah berusaha untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah seperti menyediakan media pembelajaran maupun alat-alat untuk praktek siswa serta sarana dan prasarana di ruang perpustakaan maupun sarana dan prasarana di ruang laboratorium sehingga hal ini dapat membantu pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas maupun di ruang partik. Walaupun sebenarnya konsidi media yang ada masih terbatas dan masih banyak alat maupun media yang masih belum tersedia dan perlu di tamabah.¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Kepala Sekolah sudah berusaha untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya dengan indikator bahwa di sekolah sudah tersedia sarana dan prasarana pendidikan seperti tersedianya sarana dan pasarna perpustakaan, serta sarana dan prasarna laboratorium, pembangunan dua ruang kelas baru, pembangunan satu gedung perpustakaan pada tahun 2014, mushola, namun demikian sarana pendidikan yang ada masih belum

¹Wawancara dengan ST, di ruang kantor Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Mulya, Pukul 09:00 WIB Sampai Selesai, 25 Mei 2015.

memadai karena masih banyak fasilitas yang ada di ruang perpustakaan dan ruang laboratorium yang belum tersedia secara lengkap dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas, dengan demikian maka kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan sekolah SMK Budi Mulya diharapkan untuk dapat berusaha, kerja keras, agar sarana dan prasarana yang ada di sekolah dapat tersedia dengan lengkap dan berkualitas.

Sebagaimana dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar sarana prasarana bab VII pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.²

Sesuai dengan hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nanang Fattah mengutip beberapa pendapat tentang sistem peningkatan mutu pendidikan sebagaimana disebutkannya, menurut Sellis bahwa peranan pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan antarlain:

1. Mempunyai Visi atau daya pandang yang jauh dan mendalam tentang mutu yang terpadu bagi lembaga maupun bagi dirinya;

²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan. h. 32

2. Mempunyai komitmen yang jelas pada proses peningkatan kualitas;
3. Mengomunikasikan pesan yang berkaitan pada peningkatan kualitas;
4. Meyakinkan para pelanggan (siswa, orang tua, masyarakat) bahwa terdapat “*chanel*” yang cocok untuk menyampaikan harapan dan keinginannya.
5. Pemimpin melakukan inovasi terhadap sekolah;
6. Membangun tim kerja yang efektif;
7. Mengembangkan mekanisme yang cocok untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.³

Menurut Fakry Gaffar ada beberapa faktor kunci yang perlu di peroleh seorang kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu, pertama pemahaman terhadap filosofi mutu. Kedua visi tentang peningkatan mutu berkelanjutan. Ketiga, gaya kepemimpinan yang tepat untuk membudayakan mutu. Keempat, peran strategis sesuai dengan lingkup, wewenang, dan tanggung jawab. Kelima, fokus pada tujuan utama mutu pendidikan.⁴

Kemudian Upaya dalam mencapai mutu pendidikan ada beberapa komponen yang menjadi pendukung dan menjadi prasarat menurut Dadang Suhar dalam bukunya Manajemen Pendidikan; komponen mutu tersebut yaitu, pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada mutu. Kedua,

³Nanang Fattah, *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, h.116

⁴*Ibid*, 124,

pendidikan dan pelatihan. Ketiga, struktur pendukung. Keempat, komunikasi. Kelima, ganjaran dan pengakuan. Keenam, pengukuran.⁵

Kemudian, bila ditelaah dari sudut kinerja sistemnya, mutu proses pendidikan dapat diukur dengan indikator sebagaimana dikemukakan oleh Makmun yaitu, efisiensi, produktivitas, relevansi, akuntabilitas, kesehatan organisasi, dan semangat berinovasi.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari peran penting seorang pemimpin. Yakni seorang pemimpin pendidikan harus memiliki pandangan visi dan misi yang berorientasi pada mutu pendidikan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, struktur pendukung. Keempat, komunikasi. Kelima, ganjaran dan pengakuan. Keenam, pengukuran. Ketujuh, pengawasan dan evaluasi.

⁵Dadang Suhardan, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 304.

⁶Moch Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, h. 16.

B. Kendala Kepala Sekolah dalam Usaha Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam usaha meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya. Ia mengatakan bahwa dalam mengemban tugas menjadi kepala sekolah dan menjalankan tugas banyak hal yang perlu di laksanakan baik terkait dengan manajemen pendidikan maupun manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan namun pada pelaksanaannya ada beberapa kendala disebabkan karena keterbatasan anggaran biaya, karena tidak ada komite sekolah, tidak tersedianya lahan untuk praktek, belum terelisasinya kurikulum sekolah, tidak ada donatur sekolah, kesulitan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan kurangnya partisipasi dari ketua yayasan untuk membantu agar sarana dan prasarana pendidikan di sekolah bisa tersedia secara baik dan memadai”.⁷

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya.

Pada garis besarnya manajemen sarana dan prasarana meliputi 5 hal yakni:

- a. Penentuan kebutuhan
- b. Proses pengadaan

⁷ Wawancara Dengan ST di ruang kantor Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Mulya, Pukul 09:00 WIB Sampai Selesai, 25 Mei 2015.

- c. Pemakaian
- d. Pencatatan/pengurusan
- e. Pertanggung jawaban.⁸

Carroll ilmuan yang ahli dalam bidang pendidikan psikologi, dan dalam kertas kerjanya *A. Modal of School Learning*, mengatakan bahwa pengajaran yang efektif (*instruction Effectiveness*) adalah bergantung kepada lima faktor:

1. Sikap (*attitude*) : berupa kemauan dan keterampilan peserta didik dalam belajar.
2. Kemampuan untuk memahami pengajaran (*Ability to Understand Instruction*): yaitu kemauan peserta didik untuk mempelajari sesuatu pelajaran, termasuk di dalamnya kemampuan peserta didik dalam belajar mengajar dengan bakal pengetahuan awal untuk mempelajari pelajaran akan datang.
3. Ketekunan (*perseverance*): adalah jumlah waktu yang dapat disediakan oleh peserta didik untuk belajar dengan tekun. Oleh karena itu, ketekunan adalah hasil daripada motivasi pelajar untuk belajar.
4. Peluang (*opportunity*) : yaitu peluang waktu yang disediakan oleh guru untuk mengajar sesuatu keterampilan atau konsep
5. Pengajaran yang bermutu (*quality of instruction*) adalah efektivitas suatu pengajaran yang disampaikan.⁹

Menurut peneliti Berdasarkan beberapa pendapat para ilmuan serta hasil wawancara di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa peran kepala sekolah dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam usaha meningkatkan mutu sarana dan prasarana

⁸ Barnawi, *Manajemen Saranan dan Prasarana Sekolah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h.5.

⁹ Barnawi, *Manajemen Saranan dan Prasarana Sekolah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h.77.

pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya sudah berjalan dengan baik, namun menurut peneliti belum berjalan maksimal seyogyanya kepala sekolah menjalankan tugasnya lebih profesional, menjalin kerja sama dengan pihak Dinas terkait, menjalin kerja sama dengan kepala yayasan, dengan pihak swasta, secara berkesinambungan, bekerja keras, mempunyai jiwa visioner, merencanakan sebuah program secara universal, berinovasi sehingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah bisa terwujud sebagaimana standar sarana dan prasarana yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

C. Upaya Kepala Sekolah Untuk Mengatasi Kendala dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat diketahui bahwa upaya kepala sekolah untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di SMK Budi Mulya Palangka Raya. Antara lain dengan cara menjalin hubungan dengan Dinas Pendidikan terkait dan kepada kepala yayasan Budi Mulya, berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak swasta maupun pemerintah dalam penyediaan dan peningkatan mutu pendidikan seperti BPTP Palangka Raya, balai sertifikasi dan pengawasan benih (BSPB) Palangka Raya.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam mengemban tugas menjadi Kepala banyak kendala dan tantangan yang dihadapi akan tetapi, kepala sekolah berusaha untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut, adapun upaya yang dilakukan.

Antaralain dengan cara menjalin hubungan dengan Dinas Pendidikan terkait, kepada kepala yayasan Budi Mulya, berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak swasta dan pemerintah seperti BPTP Palangka Raya maupun BSPB Palangka Raya, serta mencari donatur yang bersedia membantu untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, serta menambah sarana dan prasarana di ruang perpustakaan, dan di ruang laboratorium dengan demikian maka proses belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas.

Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan (sekolah) berbanding lurus dengan biaya yang dikelola oleh lembaga pendidikan tersebut. Semakin besar *income* dan *outcome* lembaga pendidikan dalam proses berjalannya belajar mengajar maka semakin maju juga lembaga pendidikan itu. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan yang berkualitas membutuhkan *cost* yang besar. Namun juga tidak dapat disangkal biaya (*cost*) yang besar juga tidak menjamin sebuah lembaga pendidikan dapat berjalan dengan maju tanpa adanya manajemen dan personil yang mampu mengelola dan mengorganisasikan keuangan di suatu lembaga pendidikan.

Salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya adalah kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam mencapai tujuannya secara dominan ditentukan oleh keandalan manajemen sekolah yang bersangkutan, sedangkan keandalan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolahnya.

Menurut Sumidjo sebagaimana dikutip Mulyasa, dikemukakan bahwa dalam memahami arti pendidik yang sebenarnya, maka tugas kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai terhadap tenaga kependidikan yakni:

- a. Pembinaan mental; yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak.
- b. Pembinaan moral; yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai suatu perbuatan, sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga kependidikan.
- c. Pembinaan fisik; yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan mereka secara lahiriyah.
- d. Pembinaan artistik; yaitu membina tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan terhadap seni dan keindahan.¹⁰

Penjelasan PP No, 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, juga sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Jadi, tujuan dan

¹⁰E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*,..., 2009. h. 101.

standarisasi adalah untuk meningkatkan kinerjanya dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.¹¹

Kegiatan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Depdiknas, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sebagai berikut.

- a. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian integral dan usaha peningkatan kualitas belajar mengajar.
- b. Perencanaan harus jelas.

Untuk hal tersebut, kejelasan rencana dapat dilihat pada hal-hal berikut.

- 1) Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai serta ada penyusunan perkiraan biaya/harga keperluan pengadaan.
- 2) Jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 3) Petugas pelaksana, misalnya guru, karyawan, dan lain-lain.
- 4) Bahan dan peralatan yang dibutuhkan.
- 5) Kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan.
- 6) Harus diingat bahwa suatu perencanaan yang baik adalah yang realistis, artinya rencana tersebut dapat dilaksanakan.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah dikategorikan menjadi lima yaitu:

- a. Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan)
- b. Dana Penunjang Pendidikan (DPP)
- c. Bantuan/sumbangan dari BP3
- d. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat (kalau ada)

¹¹ *Ibid*, h.87.

e. Bantuan lain-lain.¹²

Sekolah swasta tidak terikat oleh dana pemerintah terlalu banyak. Oleh karenanya, mereka lebih leluasa menyusun RAPBS-nya. RAPBS disusun dengan melalui proses tertentu, yang besar kecilnya didasarkan atas kebutuhan minimum setiap tahun, dan perkiraan pendapatannya berpedoman pada penerimaan tahun yang lalu.

UU SPN No 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa alokasi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹³

Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah (RAPBS). Oleh karena itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana dan yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, dana penunjang pendidikan (DPD), subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (BP3), donatur, badan usaha, serta sumbangan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, yayasan, dan masyarakat secara luas.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 11.

¹³ *Ibid*, h. 13.

Berdasarkan beberapa pendapat para ilmuwan dan kebijakan-kebijakan pemerintah berkaitan dengan konstitusi dalam bidang pendidikan maka dapat peneliti ambil sebuah kesimpulan bahwa keberhasilan dan ketercapaian sebuah lembaga pendidikan banyak di tentukan oleh kebijakan kepala sekolah yang profesional dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi.